

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pemungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak.

Pajak menurut *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (Erly Suandy, 2005;8) adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *Tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. menurut pasal 2 UU No.34 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak propinsi terdiri dari 4 (empat) jenis pajak, antara lain : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Ketentuan pelaksanaan dari pajak daerah selanjutnya diatur melalui peraturan pemerintahan indonesia No.65 tahun

2001 tentang pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas dasar kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. PKB dan BBNKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukannya optimalisasi peningkatan pelaksanaan pemungutan.

Sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *With Holding System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self*

*Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Peningkatan efektifitas penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya tunggakan pajak kumulatif. Hal ini perlu dilakukan karena kenyataan yang ada selama ini adalah semakin banyaknya Wajib Pajak yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutang pajaknya padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial. Pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dewasa ini kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, maka kontribusi dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor juga terus diupayakan.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan

pelayanan pajak daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD kota Surabaya, 2009). Seperti apa yang telah disebutkan di atas, maka perlu adanya kontribusi yang diberikan masyarakat untuk pemerintah yang nantinya dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana umum maupun sektor-sektor lainnya.

Nurmanto (2003:5) mendefinisikan kontribusi sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah. Diantara berbagai macam pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Bentuk kontribusi yang dapat diberikan masyarakat kepada pemerintah yaitu dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah

kota/kabupaten dan provinsi yang didalamnya terdapat pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dimana selama ini pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara sebagai upaya terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah yang belum memberikan hasil maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Periode 2009-2013 (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam merumuskan masalah ini, akan dikemukakan permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang di atas, yaitu:

1. Berapa besar kontribusi PKB dan BBNKB dalam meningkatkan PAD yang disumbangkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana persentase penerimaan PKB dan BBNKB di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013?

3. Apa saja hambatan yang dialami Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor?
4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PKB dan BBNKB dalam meningkatkan PAD yang disumbangkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2013.
2. Untuk mengetahui persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara tahun 2009 - 2013.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara untuk mengatasi hambatan dalam

melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi dalam melaksanakan sistem administrasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan, Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi pemerintahan.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk tambahan pustaka serta tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang penerimaan daerah khususnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
5. Bagi Pihak Lain yang Terkait dan Penelitian Selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pihak - pihak lain yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab metode penelitian.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hubungan empiris variabel dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini mencakup gambaran subyek penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan oleh peneliti.